

PERANAN ORANG TUA SEBAGAI ANGGOTA KOMITE DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN PALANGKA RAYA

Dewi Ratna Juwita

Dosen FKIP Universitas PGRI Palangka Raya

Abstract

Society is an important component in the success of educational activities, the active and caring community for educational activities is indispensable in the development of education in a better direction. Communities involved in the committee's organization can provide input and aspirations to support educational activities. Communities consisting of parents / guardians who are members of the committee are expected to be active in every decision making in the school either as mediator, motivator, supporter, or initiator of ideas for school programs. Thus a good relationship between school and community is essentially a very instrumental means in fostering and developing personal growth of students in schools and realize various school programs to achieve educational goals at school. This study aims to find out how the role of parents as members of the committee in Christian High School Palangka Raya which includes the role as a provider of consideration, supporters, controllers, and mediators. The population in this study is the board and members of the committee of Senior High School (SMA) Kristen which amounted to 34 people, in the sample study used is the total sample where the entire population used as sample research. The method used is descriptive method, data collection techniques using observation techniques, questionnaires and interviews and documentation while data analysis using the formula percentage. Based on the results of data analysis can be concluded: The role of parents as a member of the committee In Palangka Raya Christian High School (SMA), it can be concluded that the answer "Very Good" is (13.7%), and the answer "Good" is equal to (58.7%), and those who answered "Good Enough" were (21.4%), and those who answered "Less Good" were (6.5%). From the above percentage percentage, the highest percentage of "Good" answers (58.7%) indicates that this "Good" criterion proves that the role of parents as a member of the committee In Palangka Raya Christian High School can be categorized as "Good".

Keywords : High school, the role of parent, commite

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional merupakan wahana untuk mencapai cita-cita tujuan nasional. Pemberlakuan Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Otonomi daerah yang mengatur pembagian kewenangan berbagai bidang pemerintahan

telah berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan daerah saat ini dan masa mendatang termasuk penyelenggaraan pendidikan dalam proses pengelolaan kurikulum. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralisasi. Implikasi dari adanya peraturan dan perundang-undangan

tentang otonomi daerah maka dalam kegiatan pendidikan kita dewasa ini kita mengenal Istilah manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan terjemahan dari “School-Based Management”. Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dan adanya pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan Pendidikan Nasional. Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah “Suatu dasar pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas” (Mulyasa, 2006:11). Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan suatu strategi pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah yang merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala yang muncul dimasyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum, dimana pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan dan aspirasi sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Pelibatan

masyarakat dalam Manajemen berbasis sekolah (MBS) dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Kerjasama sekolah dan masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat terlihat dari adanya komite dalam suatu lembaga pendidikan yang terdiri dari orang tua wali siswa yang ikut serta dalam sebagian kebijakan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem social merupakan bagian integral dari sistem social yang lebih besar yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya pemenuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberikan penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat terutama terhadap sekolah. Bentuk hubungan sekolah dan masyarakat di sekolah tergabung

dalam suatu wadah atau organisasi yang disebut komite sekolah.

Komite sekolah merupakan suatu organisasi dalam kegiatan yang terbentuk atas kesepakatan dan kerjasama antara pengelola pendidikan dan masyarakat atau orang tua wali siswa untuk mengontrol dan memberikan masukan untuk peningkatan organisasi sekolah. Dalam Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa : ‘Komite sekolah adalah mitra sekolah yang tugas komite sekolah pada dasarnya mempunyai empat peran dimana peran tersebut adalah, memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator, dengan masyarakat dan pemerintah’. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan sekumpulan masyarakat atau orang tua wali siswa yang tergabung dalam suatu organisasi sekolah yang terbentuk atas kesepakatan sekolah dan masyarakat yang berfungsi sebagai penampung aspirasi dan masukan serta pengontrol kegiatan pendidikan dalam

rangka mensukseskan tujuan pendidikan dan pengajaran.

Komite sekolah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Komite sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai patner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat mewujudkan fasilitas bagi guru dan siswa untuk belajar sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Adanya sinergi antara komite dengan sekolah melahirkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya melalui keterlibatannya dalam pengelolaan pendidikan di sekolah baik, kurikulum, kesiswaan, personalia pendidikan dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Elsbree dan McNally dalam buku Ngalim Purwanto (1991) bahwa : dari adanya hubungan sekolah dan masyarakat diharapkan tercapai tujuan-tujuan berikut yakni :“1). Untuk mengembangkan mutu

belajar dan pertumbuhan siswa, 2). Untuk mempertinggi tujuan dan mutu kehidupan masyarakat, 3). Untuk mengembangkan pengertian, antusiasme dan partisipasi masyarakat”.

(Ngalim Purwanto,1991:190).

Beberapa peran masyarakat dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh pengurus komite sekolah, namun belum optimal. Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi dilapangan penelitian ada beberapa masalah yang dihadapi komite ini yang akhirnya dikatakan perannya belum optimal. Permasalahan tersebut antara lain : kurangnya pemahaman akan peran dan fungsi komite, kurangnya inisiatif masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan komite serta masalah pembinaan dan pengaturan pengurusan serta pengambilan keputusan komite yang lebih banyak didominasi sekolah, bukan orang tua atau wali siswa yang terlibat dalam kepengurusan komite sekolah. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa sebagai anggota komite peran orang tua/wali siswa tidak berjalan dengan maksimal karena sebagian besar dari anggota komite ini tidak turut serta dalam rapat-rapat atau perencanaan program pendidikan, sehingga masyarakat tidak dapat memberikan masukan dalam

kegiatan pengambilan keputusan. Selain itu anggota komite lebih banyak memberikan peluang dan otoritas kepada sekolah sebagai pengambil keputusan dalam program pendidikan.

Masyarakat merupakan komponen sekolah yang sangat berperan serta dalam keberhasilan kegiatan pendidikan, masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kegiatan pendidikan adalah sangat diperlukan dalam pembangunan pendidikan kearah yang positif untuk membangun bangsa dan Negara ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan komite masyarakat diharapkan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kegiatan pendidikan baik dalam bentuk memberikan sumbang saran, kritik dan masukan maupun dalam bentuk sumbangan material atau sumbangan financial, dengan respon positif yang diberikan masyarakat terutama yang tergabung dalam organisasi komite diharapkan komite dapat berfungsi dengan maksimal untuk menampung aspirasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama dalam kegiatan komite sekolah.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya merupakan salah satu Sekolah Menengah Tingkat atas memiliki akreditasi “A”. Dengan berbagai prestasi, disiplin dan segala kompetensi yang dimiliki, Sekolah Menengah Atas

(SMA) Kristen Palangka Raya mampu merebut perhatian masyarakat. Melalui komite (kerjasama sekolah, masyarakat atau orang tua siswa) pengelola pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen berusaha menampung semua aspirasi masyarakat, namun dengan demikian tidak sepenuhnya perjalanan komite di sekolah tersebut berjalan lancar. Berdasarkan uraian pada latar belakang dan hasil pengamatan terhadap kegiatan komite sekolah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sejauhmana peran orang tua/wali siswa dalam pengambilan keputusan sebagai anggota komite sekolah. Adapun judul penelitian ini adalah tentang “Peranan Orang Tua Sebagai Anggota Komite Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya”.

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata dasar “*peran*”. Dalam Kamus Manajemen “Peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi khususnya menyangkut fungsi yang dilaksanakan”. (Kamus Manajemen, 2003:263). Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain

peranan adalah “Serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu (Muhamad Ozer Usman, 1995:1). Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah: “Tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa/seorang yang punya pengaruh besar dalam menggerakkan”. (Ahmad Sudrajat, 2009: 4). Dari pengertian di atas, tergambar bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pemegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi, khususnya menyangkut fungsi yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah di amanahkan untuk di jalankan dengan sebaik mungkin.

2. Masyarakat atau orang tua dalam pendidikan

Istilah masyarakat berasal dari akar kata arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta (berpartisipasi). Dalam Bahasa Inggris dipakai istilah Society yang berasal dari kata latin Sociu yang berarti kawan. Dalam artikelnya Adnan Agnesa menjelaskan tentang pendapat beberapa ahli yang memberikan definisi tentang masyarakat, antara lain adalah :

Menurut Solo Soedmarjand mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, dan Menurut Emile Durkheim berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan antar anggota sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-ciri sendiri. (WWW. Makalah kesehatan masyarakat oleh Adnan Agnesa tahun 2011:1). Dengan demikian Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan/ kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Dalam kegiatan pendidikan masyarakat yang terdiri dari orang tua maupun wali siswa merupakan komponen penting yang menunjang terlaksananya kegiatan pendidikan, masyarakat yakni orang tua/ wali siswa dapat bertindak sebagai pelaku pendidikan, pengawas pendidikan, dan juga sebagai sumber pendidikan. Oleh karena itu orang tua dalam kehidupan

sosial kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan ruang bebas bagi kegiatan pendidikan, dengan memfasilitasi kebutuhan pendidikan salah satunya memfasilitasi kebutuhan belajar anak didik atau siswa di sekolah misalnya sebagai sumber belajar dan lainnya.

3. Konsep Dasar Komite Sekolah

a. Pengertian

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite sekolah merupakan suatu organisasi dalam kegiatan yang terbentuk atas kesepakatan dan kerjasama antara pengelola pendidikan dan masyarakat atau orang tua wali siswa untuk mengontrol dan memberikan masukan untuk peningkatan organisasi sekolah. Dalam lampiran II Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 pada bagian 1 dijelaskan bahwa :

Komite Sekolah adalah “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah” (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002). Dalam Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 lampiran II bagian IV tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa : “Komite sekolah adalah mitra sekolah yang tugas komite sekolah pada dasarnya mempunyai empat peran dimana peran tersebut adalah, memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator, dengan masyarakat dan pemerintah”. (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002) Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bahwa : “Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam

peningkatan mutu dan pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2003:29) Amina Rahmawati dalam artikelnya menjelaskan bahwa “Komite sekolah merupakan suatu organisasi yang dibentuk sebagai tempat atau sarana mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan”. (<http://www.AminaRahmawati.com>, 2009). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan sekumpulan masyarakat atau orang tua wali siswa yang tergabung dalam suatu organisasi sekolah yang terbentuk atas kesepakatan sekolah dan masyarakat yang berfungsi sebagai penampung aspirasi dan masukan serta pengontrol kegiatan pendidikan dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan dan pengajaran.

b. Tujuan Dan Fungsi

Komite sekolah dibentuk berdasarkan :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Dalam Bab VII Pembangunan Pendidikan di point program-program Pembangunan komite sekolah termasuk Sasaran yang akan dicapai oleh program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah.
2. Dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002
3. Sebagai acuan dapat digunakan Lampiran II Kepmendiknas No. 033/U/2002. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56 : ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Komite merupakan organisasi yang dibentuk masyarakat dan sekolah sebagai wadah menyalurkan berbagai aspirasi orang tua/wali siswa mewakili masyarakat memiliki tujuan dan

sasaran-sasaran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dalam lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044 tanggal 2 April 2002 bagian III tentang tujuan, dijelaskan bahwa tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan".(Kepmendiknas nomor : 044/U/2002).

Dalam lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044 tanggal 2 April 2002 bagian IV tentang Peran Dan Fungsi, dijelaskan bahwa Komite Sekolah Berfungsi, sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

- penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
 - 2) Kebijakan dan program pendidikan
 - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) Kriteria tenaga kependidikan
 - 5) Kriteria fasilitas pendidikan,
 5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan”. (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari pembentukan komite sekolah adalah mewadahi berbagai masukan, kritik dan saran masyarakat dalam perkembangan pendidikan kearah yang lebih baik, selain itu komite sekolah merupakan sumber inspirasi masyarakat agar selalu aktif dalam melihat perkembangan pendidikan dengan ikut serta dalam perencanaan program dan mengevaluasi dan mengawasi program tersebut, Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

c. Perangkat Organisasi

Komite sekolah atau dikenal juga dengan dewan pendidikan merupakan kumpulan masyarakat yang tergabung dalam suatu organisasi yang berperan dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah, dimana keberadaannya sebagai penyalur dan penampung aspirasi masyarakat dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pembentukan komite memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada, sehingga harus diperhatikan susunan perangkat dari komite yaitu organisasi yang terdiri dari unsur masyarakat, perangkat minimal komite.

1. Kepengurusan : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota
2. Job Description tiap personel : Yang mengatur siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa agar tidak ada tumpang tindih tugas dan kewenangan tata-hubungan antarpersonel perlu diperhatikan : interest dan keahlian
3. AD/ART (atau panduan organisasi) : Merupakan salah satu perangkat organisasi yang penting dan harus ada dimana Bentuk dapat bervariasi bergantung pada tingkat besar/kecilnya organisasi. Dimana AD/ART mengatur : (1) Dasar dan Tujuan organisasi, (2) Kegiatan organisasi, (3) Keanggotaan dan kepengurusan dan (4) Pengelolaan keuangan, (5) Mekanisme pengambilan keputusan, (6) Perubahan AD/ART (7) Pembubaran organisasi

4. Fasilitas Penunjang : Organisasi mustahil dapat berjalan tanpa fasilitas penunjang (fasilitas penunjang organisasi Komite Sekolah minimal adalah meja kerja Ketua Komite Sekolah), atau lebih baik ada ruang kerja Komite Sekolah". (www.depdiknas.go.id tahun 2011)

4. Peranan Masyarakat (orang tua) sebagai anggota komite sekolah Dalam Pengambilan Keputusan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya

Pendidikan merupakan produk dari masyarakat, dimana pendidikan merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Masyarakat merupakan komponen penting yang ikut menentukan arah pembangunan bangsa termasuk pembangunan dalam bidang pendidikan. Dalam pembangunan pendidikan peran serta dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai

dengan kepentingan mereka. Turut serta dalam hal pengambilan keputusan merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam hal ini khususnya orang tua siswa yang merupakan hal penting yang selalu dilakukan dalam kegiatan pendidikan, pengambilan keputusan dilakukan secara bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan melibatkan berbagai komponen pendidikan, personel sekolah, masyarakat maupun instansi terkait pendidikan. Seperti yang dijelaskan Suhadinet dalam artikelnya tentang “Peran Serta Masyarakat (PSM) Terhadap Pendidikan” bahwa orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademi maupun akademi dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)”. (Suhadinet, 2011 www.hhttp Peran Serta Masyarakat (PSM) Terhadap Pendidikan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Peran serta orang tua sebagai anggota komite sekolah dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah adanya keterlibatan aktif dari orang tua dalam menyelenggarakan kegiatan kurikulum

seperti memfasilitasi kegiatan belajar siswa di masyarakat, menyediakan sarana dan fasilitas belajar serta ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Meningkatkan peran serta orang tua memang sangat erat berkaitan dengan perubahan cara pandang orang tua terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai kapan rasa memiliki, rasa peduli, keterlibatan dan peran serta aktif orang tua sebagai anggota komite sekolah dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan.

Sanapiah Faisal dalam bukunya Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan mengemukakan bahwa hubungan antar sekolah (pendidikan) dengan masyarakat paling tidak, bisa dilihat dari dua segi berikut :

1. Sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, berarti keduanya yaitu sekolah dan masyarakat dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional.

2. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat dan lingkungannya". (Sanapiah Faisal, 2007:23))

Berdasarkan hal ini, berarti antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak. Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, masyarakat yang merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga pendidikan, dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Bagaimanapun kemajuan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dalam hal ini khususnya orang tua atau wali siswa yang ada. Dalam era otonomi daerah ini, dimana sekolah memiliki otonomisasi dan ruang gerak yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Ruang gerak yang besar tersebut, sudah seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh sekolah dengan memberdayakan peran serta atau partisipasi masyarakat semaksimal mungkin. Dijelaskan kembali oleh Sanapiah Faisal bahwa : Peran serta masyarakat (orang tua siswa) dalam pemberdayaan pendidikan antara lain adalah : a). Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan, b). Dalam

pengembangan pendidikan yang berkualitas dan berkeunggulan, c). Pengelolaan sumber-sumber lain yang terdapat dalam masyarakat (Sanapiah Faisal, 2007: 67). Selain keluarga dan sekolah, masyarakat secara luas memiliki peran tersendiri terhadap pendidikan. Berikut ini adalah beberapa peran dari masyarakat (orang tua siswa) terhadap pendidikan (sekolah).

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah.
2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat.
3. Masyarakatlah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya.
4. Masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang dihadapi
5. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.

(Sanapiah Faisal, 2007:35)

Dari pendapat ahli di atas, terlihat jelas sekali bahwa masyarakat dalam hal ini khususnya orang tua atau wali siswa memiliki peran yang cukup besar terhadap

pendidikan sekolah, dimana peran tersebut dapat direalisasikan melalui keaktifan orang tua sebagai anggota komite di sekolah.

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Bab XV pasal 54 dinyatakan bahwa : “ Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan...”. Selanjutnya Muhammad Faiq Zaki 2010 dalam artikelnya http://peran_serta_masyarakat_PSM menjelaskan bahwa : “Peranan masyarakat/ komite sekolah dalam kegiatan pengambilan keputusan di Sekolah meliputi peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator.”. (Muhammad

Faiq Zaki 2010 http://peran_serta_masyarakat_PSM).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif yaitu: “Studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya”. (Sudjana, 2000:52). Selanjutnya Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan analisis data hasil penelitian secara eksak dan menganalisis datanya menggunakan perhitungan statistik tentang Peran orang tua sebagai anggota komite sekolah Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya. Berikut adalah Instrument penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1
Variabel Peran orang tua sebagai anggota komite sekolah Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pertanyaan
Peran orang tua sebagai anggota komite sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya	1. Pemberi pertimbangan (advisory) 2. Pendukung (Supporting) 3. Pengontrol (controlling) 4. Mediator	1. Memberikan masukan, pertimbangan, serta rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan kurikulum. 2. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan 3. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan 4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu 5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan 6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat 7. Sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat (Humas)	8, 18, 23, 4, 6, 7, 14, 27, 28 1, 2, 3, 12, 9, 10, 13, 21.5, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25 dan 26

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut yakni, observasi, angket dan wawancara. Dengan Teknik Analisis Data menggunakan analisis persentase dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Jumlah frekuensi/banyaknya individu

P = Angka persentase

100 % = Angka pengali tetap (Anas Sudijono, 2001:40)

Sebagai pedoman dalam penelitian atau interprestasi terhadap kedudukan presentase dalam penelitian ini maka ditetapkan kriteria penilaian dengan tingkatan gradual sebagai berikut:

1. 76 % - 100 % Baik sekali
2. 51 % - 75 % Baik
3. 26 % - 50 % Cukup baik
4. 0 % - 25 % Kurang baik. (I Wayan Ardana Cs, 1973:53).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
 Persentase analisis data Peranan Orang Tua Sebagai Anggota Komite Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya

No	Kategori	Persentase
1	Baik sekali	13,7%
2	Baik	58,7%
3	Cukup baik	21,4%
4	Kurang baik	6,5%

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan rumus persentase maka ditemukan hasil penelitian sebagaimana tertera dalam tabel tersebut di atas yang dapat dideskripsikan sebagai

berikut bahwa Peranan Orang Tua Sebagai Anggota Komite Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya, dapat disimpulkan bahwa yang menjawab “Baik Sekali” sebesar (13,7%,) dan yang menjawab dan yang menjawab “Baik” sebesar (58,7%), dan yang menjawab “Cukup Baik” sebesar (21,4%), dan adalah kurang baik sebesar (6,5%). Dari hasil analisis tersebut diatas, diperoleh persentase paling tinggi yaitu jawaban “Baik” (58,7%)

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data diperoleh persentase paling terhadap hasil penelitian tentang Peranan Orang Tua Sebagai Anggota Komite Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya yaitu jawaban “Baik” sebesar (58,7%) hal ini berarti menunjukkan kriteria “Baik” ini membuktikan bahwa Peranan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Palangka Raya dapat di kategorikan ‘Baik’.

Hasil penelitian ini dapat mejadi rekomendasi untuk sekolah dan komite untuk terus meningkatkan peran serta mereka dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan yang baik dan bermutu dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi, LiaYuliani. (2008). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta : Aditya Media
- Adi Cita Karya Nusa Umaedi. (1999). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Depdiknas.
- Daryanto (2010). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional (2001) *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (2008). *Manajemen Sekolah*. Sawangan Depok.
- Depdikbud. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Faisal, Sanapiah (2007) *Format-Format Penelitian Social*, Jakarta : Rineka Cipta
- Faisal Sanapiah (2006) *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Hasibuan, H. Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hadari Nawawi (1994) *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : CV H Masagung
- [Http://kafeilmu.Co.Cc/2011/01/partisipasi-masyarakat-dalam-pendidikan](http://kafeilmu.Co.Cc/2011/01/partisipasi-masyarakat-dalam-pendidikan)
- Iskandar.(2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan social*. Jakarta: GP Press.
- I Wayan Ardana, CS (1973) *Rancangan Penelitian dan Kebijakan Sosial*, Jakarta : CV Rajawali
- Mulyasa (2006) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Joko Susilo, (2006) *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, : Manajemen Pelaksanaan Dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset
- Ngalim Purwanto(1991) *Administrasidan supervise pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pedoman Penulisan Skripsi. Tahun 2009. Palangka Raya : Universitas Palangka Raya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Riduwan (2005). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan Dan PenelitiPemula*. Bandung: Alfabeta
- Surachmad, Winarno. (1994). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Sudijono, Anas. (2001). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudjana,2004. *Manajemen Program Pendidikan*. Falah Production. Bandung